

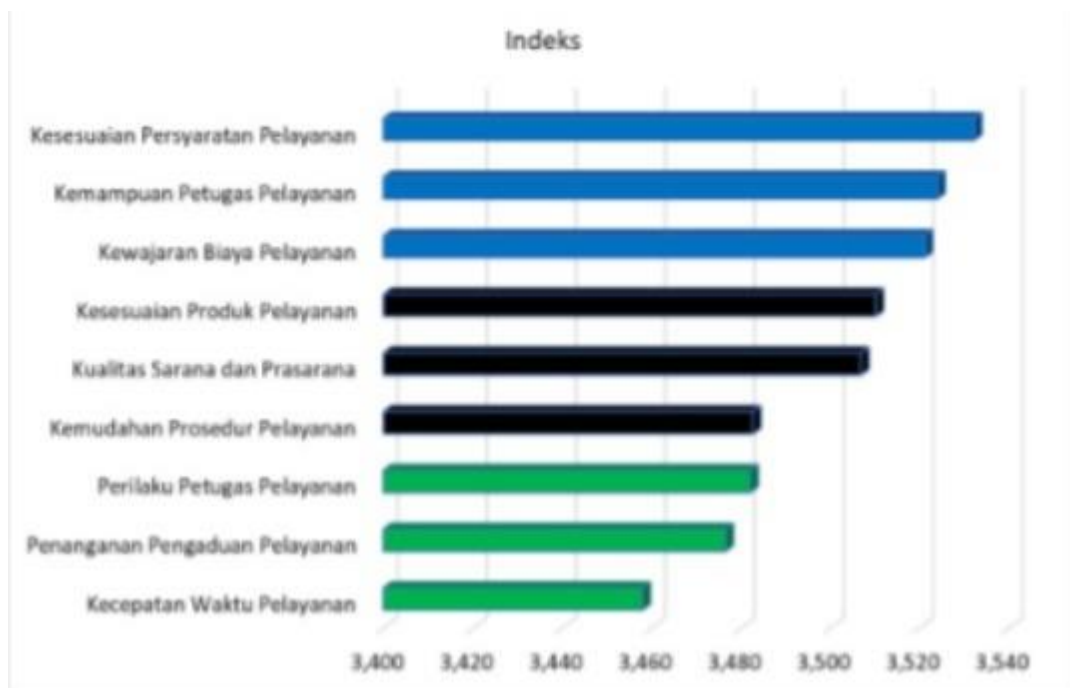
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desakan perubahan kerap ditujukan kepada petugas pemerintahan mengenai pelayanan masyarakat yang disediakan. Perlu adanya perubahan kepegawaian yang ada agar semua pegawai dapat menyesuaikan dengan segala perubahan sehingga dapat terciptanya sistem pemerintahan yang berdaya guna (Yandra, 2016). Demi meningkatkan pelayanan publik di Indonesia oleh karena itu diperlukannya suatu kebijakan yang dapat mengatur agar pelayanan publik di Indonesia dapat lebih efektif.

Menurut data yang diperoleh dari Ombudsman RI 2022, Pemerintah Daerah menempati urutan pertama sebagai instansi terlaporkan yaitu sebanyak 41,58% atau sebanyak 3435 laporan, yaitu Kepolisian sebanyak 12,71% atau sebanyak 1052 laporan, dan Instansi Pemerintah / Kementerian sebanyak 9,55% atau sebanyak 789 laporan. (Sumber : <http://www.ombudsman.go.id/> diakses tanggal 12 Februari 2023). Menurut data tersebut menandakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Isu yang paling dikeluhkan masyarakat dalam layanan publik adalah perizinan usaha. Menurut data Ombudsman Jawa Timur, DPMPTSP menempati urutan laporan masyarakat 2 terbesar dengan jumlah laporan sebesar 6,43%.



Gambar 1.1 Nilai Indeks Pelayanan DPMPTSP Sidoarjo tahun 2022

Pada penilaian pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sesuai gambar 1.1, didapati bahwa ada 3 penilaian terbawah atau 3 terburuk. Yang pertama yaitu perilaku petugas pelayanan sebesar 3,480 ; yang kedua ada penanganan petugas pelayanan sebesar 3,475 ; dan yang terakhir yaitu kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,455.

Jumlah laporan masyarakat Provinsi Jawa Timur terkait pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo menempati urutan kelima terbanyak. Dengan banyaknya laporan yang ada pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha memperbaiki sistem pelayanan publiknya, salah satu caranya yaitu dengan merealisasikan implementasi sistem perizinan secara online yaitu melewati *system Online Single Submission* yang berada di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

Adanya laporan pelayanan publik mengenai perizinan, pemerintah

akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan berbasis online yakni, OSS ialah sebuah aplikasi yang difungsikan guna membantu proses pendaftaran pada urusan perizinan sesuai dengan PERBUP Sidoarjo No 62/2018 pasal 2 ayat 1 yang memutuskan bahwasannya setiap penerbitan izin usaha harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan adanya sistem OSS ini dapat mempercepat penerbitan izin yaitu sekitar 1 atau 2 jam saja.

Pengambilan lokasi studi ini dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dikarenakan adalah lokasi pertama di Jawa Timur yang menerapkan kebijakan pelayanan perizinan melalui sistem OSS pada tanggal 2 Agustus 2018.

Tabel 1.1 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Menggunakan OSS Pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

NO	BIDANG	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	Kesehatan	1. Izin toko obat 2. Izin usaha penjualan alat kesehatan 3. Sertifikat produksi UKM obat herbal 4. Sertifikat produksi industri rumah tangga (PRT) alat medis dan PKRT 5. Izin pengelolaan pengendalian vektor dan hewan penular penyakit 6. Izin operasional klinik 7. Izin pendirian rumah sakit 8. Izin operasional rumah sakit 9. Izin operasional laboratorium klinis umum dan spesialis 10. Sertifikat produksi makanan industri rumah tangga 11. Izin apotek

2.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin pembukaan program atau institusi pendidikan 2. Izin operasional lembaga pendidikan non formal
3.	Pertanian	1. Pendaftaran usaha peternakan 2. Pendaftaran usaha perkebunan 3. Pendaftaran usaha tanaman pangan 4. Pendaftaran usaha budidaya hortikultura 5. Izin usaha perkebunan 6. Izin usaha tanaman pangan 7. Izin usaha hortikulturan 8. Izin usaha peternakan
4.	Pekerjaan Umum	1. Sertifikat kelayakan bangunan 2. Izin peil banjir 3. Izin usaha jasa konstruksi
5.	Ketenagakerjaan	1. Izin operasional lembaga penyaluran tenaga kerja swasta 2. Izin lembaga pelatihan kerja (LPK)
6.	Lingkungan Hidup	1. Persetujuan pengelolaan limbah B3 2. Izin pengelolaan limbah B3 bagi perusahaan jasa 3. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan serta pemantauan lingkungan (SPPL)
7.	Perhubungan	1. Izin penetapan lokasi untuk lepas landas dan pendaratan helikopter 2. Izin usaha penyediaan jasa angkutan di perairan 3. Izin usaha angkutan laut dan pelayaran rakyat

		4. Izin penyelenggaraan angkutan orang 5. Izin usaha angkutan sungai dan danau
8.	Pariwisata	1. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)
9.	UMKM	1. Izin untuk mendirikan kantor cabang koperasi simpan pinjam 2. Izin untuk membuka kantor kas koperasi simpan pinjam 3. Izin bagi koperasi simpan pinjam 4. Izin UMKM 5. Izin untuk mendirikan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam
10.	Perindustrian	1. Perluasan wilayah 2. Izin usaha industri 3. Izin usaha kawasan industry
11.	Perdagangan	1. Tanda daftar gudang 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 3. Nomor identitas importir serta tanda daftar perusahaan 4. Surat Izin Usaha Perdagangan

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo 2021

Dengan adanya perizinan melalui sistem OSS yang dapat mempercepat sistem perizinan membuat semakin banyak investor lokal serta asing yang ingin menanam modal pada sektor usaha di Kabupaten Sidoarjo. Dengan meningkatnya jumlah investor pendapatan wilayah dan laju ekonomi di Kabupaten Sidoarjo meningkat dan membuat masyarakat Kabupaten Sidoarjo semakin sejahtera. Dari latar belakang diatas, maka dari itu penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62

Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No 62/2018?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan berintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) Berdasarkan Model Edward III?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No 62/2018.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong serta menghambat implementasi Kebijakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) Berdasarkan Model Edward III.

1.4. Kegunaan Penelitian

Menurut tujuan studi diatas maka dapat diambil 3 sisi kegunaan penelitian:

- a. Manfaat bagi peneliti

Peneliti mendapatkan informasi dan wawasan serta dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No 62 /2018 Tentang Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Pada

DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

b. Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No 62 /2018 Tentang Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

c. Manfaat bagi masyarakat

Masyarakat dapat memahami dan memberikan kritik maupun saran terkait proses Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No 62 /2018 Tentang Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Pada DPMPTSP Kab. Sidoarjo.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu adalah berbagai studi yang telah dipublikasikan dan memiliki tema serupa yaitu “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik Melalui Sistem OSS pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo”, sebagai kajian literatur dari peneliti.

Dari penelitian Suhartoyo yang meneliti tentang implementasi fungsi pelayanan publik dalam PTSP. Unit pelayanan di desain dalam beberapa dua bentuk yaitu merupakan satuan/unit kerja tertentu dan adalah satuan kerja yang menangani layanan perizinan investasi.

Dari penelitian Fatah Hidayat,dkk yang meneliti tentang implementasi

PTSP: Dalam upaya mencapai tujuan kebijakan PTSP, studi mengenai implementasi PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi dan pembentukan lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara adalah langkah awal yang sangat signifikan. Selain itu, pencapaian tujuan kebijakan akan terkhusus pada kesediaan pemimpin untuk menyerahkan kekuasaan kepada organisasi pelaksana.

Dari penelitian Arif Alauddin yang meneliti tentang PTSP Kabupaten Gorontalo. Teori kesesuaian Korten tidak relevan dengan PTSP di Kabupaten Gorontalo, terbukti tidak tercapainya kesesuaian yang diperlukan secara keseluruhan antara penerima manfaat, program, serta organisasi pendukung.

Dari penelitian Nuria Siswi yang meneliti tentang kualitas pelayanan publik dalam perizinan di PTSP Kantor BPM2T Kabupaten Boyolali. Dari segi kedisiplinan, pelayanan mengikuti jadwal yang telah dijadwalkan dan tepat waktu. Selain itu, mayoritas pegawai BPMPTSP merupakan lulusan S1, sehingga mendukung potensi dalam memberikan pelayanan. Hal ini cukup mendukung upaya BPMP2T dalam mewujudkan *bestuur zorg* bagi masyarakat dengan memberikan bobot yang sama antara kuantitas dan kualitas dalam pelayanan perizinan.

Dari penelitian Muhtamat yang meneliti tentang Kebijakan Pelayanan OSS oleh DPMPTSP di Kabupaten Kudus. Untuk dapat memahami pelayanan publik yang ditawarkan oleh DPMPTSP di Kabupaten Kudus, maka masyarakat harus dapat memantau dan menganalisis kualitas pelayanan. STudi ini bertujuan guna mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Kudus terkait layanan OSS yang

diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus, serta pedoman yang mengatur tentang layanan ini.

Penelitian Internasional dari Angga Dwi,dkk yang meneliti tentang transformasi pelayanan publik. Integrasi sistem aplikasi perizinan belum berjalan dengan baik karena transisi sistem aplikasi dengan demikian proses tranformasi layanan dari manual ke online harus membayar perhatian pada integrasi sistem lama ke yang baru.

Penelitian dari Joni Dawud yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan OSS pada DPMPTSP Kabupaten serta Kota Bandung mempunyai kualitas aparatur memadai dalam melaksanakan OSS, serta proses Pelayanan yang ada telah diterapkan secara digital. Untuk memaksimalkan penerapan OSS, masih terdapat tantangan terkait sosialisasi, kurangnya SDM untuk menangani beberapa layanan lain, dan fasilitas pendukung lainnya.

Penelitian Internasional dari Prijo Dwi yang meneliti tentang kebijakan *Online Single Submission* pemerintah lokal muncul di era globalisasi. Pemerintah mengatur penerbitan izin usaha, Lembaga OSS, pendanaan OSS, intensif perizinan usaha, pemecahan masalah hambatan bisnis, dan sanksi.

Penelitian dari Ghina Ridho yang meneliti tentang Penerapan Sistem Perizinan OSS di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Indikator tersedianya data dan informasi untuk tujuan promosi daerah, di mana Kantor DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa strategi untuk mengiklankan Sistem Perizinan OSS di berbagai daerah, datanya sudah cukup akurat dan lengkap. Indikator aksesibilitas program E-Government yang memudahkan pekerjaan kantor serta

layanan publik, dimana teknologi dan infrastruktur Sistem OSS Kantor DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sudah cukup memadai untuk memungkinkan penerapan sistem tersebut.

Penelitian Internasional dari Irani Windhyasiti,dkk yang meneliti tentang peran *Online Single Submission* (OSS) meningkatkan investasi kota. 2 poin keunggulan OSS yaitu pertama, dianggap mudah digunakan dan niat perilaku berdampak positif serta signifikan pada kinerja OSS. Kedua, kinerja OSS berpengaruh positif terhadap daya tarik investasi.

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	TEORI DAN METODE	HASIL PENELITIAN
1	Suhartoyo (2020)	Implementasi fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Teori: Partisipatif Metode: Penelitian Kualitatif	Temuan-temuan tersebut menyarankan agar sistem PTSP dapat digantikan dengan kebijakan sistem pelayanan satu atap. Namun, jika sistem baru ini tidak dapat menunjukkan efektivitas pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur layanan yang sederhana dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang memerlukan, maka sistem ini tidak akan memberikan perubahan yang diinginkan

3	Arif Alauddin (2016)	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Gorontalo	Teori: Kesesuaian Korten Metode: Penelitian Kualitatif	Pelaksanaan Pelayanan PTSP di KPT Kabupaten Gorontalo belum optimal dan belum memenuhi mutu. Temuan studi mengindikasikan bahwasannya kualitas dan keberhasilan Pelayanan PTSP, terutama jenis pelayanan IMB, SIUP, dan SIGU di KPT Kabupaten Gorontalo, belum terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.
4	Nuria Siswi (2017)	Kualitas pelayanan publik dalam perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM2T) Kabupaten Boyolali	Teori: Pelayanan Publik Metode: Penelitian Kualitatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMP2T Kabupaten Boyolali menunjukkan hasil yang sangat baik. Terdapat mekanisme pengaduan yang transparan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan, serta sistem dan proses perizinan yang terdiri dari lebih dari 40 jenis dan kategori izin yang mudah dimengerti dan dapat dibaca di kantor BPMP2T, menunjukkan bahwa BPMP2T ialah instansi perizinan yang aktif serta terstruktur serta mampu memuaskan masyarakat.

5	Muhtamat (2021)	Kebijakan Pelayanan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus	Teori: Pelayanan Perizinan Metode: Penelitian Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP dalam kebijakan pelayanan OSS di Kabupaten Kudus yakni melaksanakan fungsi DPMPTSP sebagai cabang dan memantapkan diri sebagai agen dengan cara mengenalkan, menyesuaikan, serta memberikan binaan kepada para pelaku usaha serta masyarakat yang akan mengajukan perizinan, baik perizinan berusaha maupun non berusaha melalui OSS dan pelayanan izin usaha yang terhubung secara elektronik melalui OSS di DPMPTSP Kabupaten Kudus
6	Angga Dwi,dkk (2016)	Transformasi pelayanan publik	Teori: Transformasi Metode: Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan adanya perubahan <i>Single Online Submission</i> yaitu penginputan data dan fokus pada pelayanan dalam penerbitan izin usaha dilakukan melalui sistem layanan, dengan memperhatikan durasi yang diperlukan untuk proses perizinan. Dalam layanan PTSP, input data dilakukan oleh layanan staf. Setelah adanya Sistem layanan <i>Online Single Submission</i> maka

				dilakukan input data dilakukan oleh pelaku usaha. fokus layanan PTSP yang awalnya memberikan layanan tuntas, kini beralih kepengawasan data yang dimasukkan oleh pelaku usaha. Bisnis lisensi yang sebelumnya dikeluarkan dibagian akhir, sekarang diterbitkan diawal tetapi dengan syarat. Sistem pelayanan yang semula manual kini berubah menjadi system online. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sekitar 5 hari. Setelah dengan dikeluarkannya Sistem layanan <i>Online Single Submission</i>, pelaku usaha hanya membutuhkan waktu 1 jam saja mengurus perizinan.
7	Joni Dawud, dkk (2021)	Implementasi Kebijakan <i>Online Single Submission</i> pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)	Teori: Penerapan Kebijakan Edward III Metode: Penelitian Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, implementasi OSS di DPMTSP Kabupaten serta Kota Bandung telah terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari kebijakan-kebijakan turunan yang telah ditetapkan oleh kedua pemerintah daerah tersebut sebagai landasan hukum pelaksanaan OSS.

8	Prijo Dwi (2020)	Kebijakan <i>Online Single Submission</i> pemerintah lokal muncul di era globalisasi	Teori: Pelayanan Perizinan Metode: Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan layanan perizinan berusaha untuk diintegrasikan secara elektronik atau yang disebut pengiriman tunggal online diatur dalam PP No 24 Tahun 2018 dan lainnya ketentuan yaitu Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Perilaku Bisnis, bersama dengan paket kebijakan ekonomi volume 16 bertujuan untuk menjadi baik demi kebaikan kemudahan investasi, tetapi ada masih banyak kendala yang dihadapi petugas /pejabat dan pelaku usaha yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Dari sudut pandang kelembagaan, OSS bertentangan dengan UU Nomor 25 tentang Investasi karena tubuh itu yang harus mengelola investasi adalah BKPM.
9	Ghina Ridho (2020)	Penerapan Sistem Perizinan <i>Online Single Submission</i> (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Teori : E-Government Metode: Penelitian Kualitatif	Temuan studi ini menunjukkan bahwa, terlepas dari beberapa tantangan terkait implementasi, sistem perizinan OSS di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo telah beroperasi dengan lancar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan temuan analisis yang menggunakan indikator-

		(DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo		indikator untuk mencapai implementasi pemerintahan elektronik, termasuk tanda ketersediaan data dan informasi di pusat data, yaitu data dan informasi yang telah disusun dengan baik di server kantor dan di antara indikator lainnya.
10	Irani Windhyasiti, dlk (2020)	Peran <i>Online Single Submission</i> (OSS) meningkatkan investasi kota	Teori: Kinerja Aparatur Metode: Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian juga menunjukkan kinerja <i>Online Single Submission</i> (OSS) berpengaruh positif dan signifikan (nilai $p < 0,05$) terhadap investasi objek wisata di Kota Batu. Artinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja sistem perizinan untuk meningkatkan investasi. temuan studi ini selaras dengan hasil dari penelitian Suhendra yang menunjukkan bahwa kebijakan yang pro investasi termasuk di dalam proses perizinan dapat membantu pencapaian target investasi (Suhendra, 2017). Selain itu studi ini juga selaras dengan temuan studi Widhayanti penelitian yang menunjukkan bahwa skor tertinggi dalam menentukan daya tarik Penanaman Modal Daerah adalah aparatur dan pelayanan dalam perizinan

				usaha (Widhayanti, 2012). Hasil penilaian rating <i>Online Single Submission</i> (OSS) sangat baik yaitu 4,5 dikisaran skala 1 sampai 5. Serta hasil penilaian peringkat daya tarik investasi juga sangat bagus di 4,16 dalam kisaran skala 1 sampai 5
--	--	--	--	--

Kesimpulan:

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan PERBUP Sidoarjo No. 62/2018 tentang Pelayanan perizinan Terintegrasi Elektronik (*Online Single Submission*) pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo” mempunyai kemiripan dengan jurnal penelitian terdahulu yang berjudul “Penerapan Sistem Perizinan OSS di Dinas DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo”. Perbedaan pada studi yang dimiliki peneliti yaitu adanya teori implementasi menurut Edward III, supaya implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 dapat dijelaskan lebih detail.

1.5.2. Administrasi Publik

Menurut Dr. H. Amin Ibrahim, Administrasi Publik ialah segala pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada konsep manajemen yaitu (pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) menggunakan sebuah prosedur kerja yang menyesuaikan dengan SDM yang ada.

Menurut Nigro, Administrasi Publik ialah kerjasama antara para *stakeholder* dalam kebijakan publik, yang terdiri dalam tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif serta yudikatif untuk dapat mensejahterakan kepentingan publik.

Menurut Dwight Waldo, Administrasi Publik adalah manajerial antara orang-orang didalam sebuah organisasi yang memiliki keinginan untuk pencapaian tujuan pemerintah.

1.5.3. Kebijakan Publik

Menurut Irfan Islamy (2003:20) kebijakan publik merupakan sekumpulan kegiatan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pressman dan Widavsky (2002: 17) mengartikan kebijakan publik sebagai keadaan awal dari suatu kegiatan pemerintahan yang dapat diprediksikan sebelumnya.

Chandler dan Plano (2003: 1) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah suatu pemecahan masalah publik yang menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang strategis.

Bentuk-bentuk kebijakan publik dibagi 3, yaitu :

- a. Kebijakan publik makro adalah suatu kebijakan publik yang memiliki pengaruh paling besar karena menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan dibawahnya, seperti UUD, UU dan lainnya.
- b. Kebijakan publik meso ialah sebuah kebijakan yang bersifat *middle* ataupun pengaruhnya berada di tengah-tengah jadi tidak mendasar tetapi cukup berpengaruh pada suatu wilayah, yaitu Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan lainnya.

- c. Kebijakan publik mikro ialah kebijakan publik yang paling kecil jangkauannya dan biasanya implementasinya lebih spesifik karena mengetahui daerah-daerah yang dijangkau, yaitu pada Kota atau Provinsi, contohnya Peraturan Walikota, Peraturan Bupati dan lainnya.

Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik menurut William Dunn:

- a. Tahap penyusunan agenda

Semua orang yang telah diberikan hak untuk mengusulkan suatu permasalahan publik apa yang akan dibahas, berkompetisi agar masalah yang ia ajukan dapat dilanjutkan pada tahap formulasi dan seterusnya.

- b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah lolos seleksi pada tahap penyusunan agenda kebijakan akan dilanjutkan pada tahap formulasi kebijakan yang akan dirundingkan oleh para pembuat kebijakan. Semua masalah yang lolos seleksi akan dirundingkan tentang bagaimana solusi untuk memecahkan masalahnya dan mengetahui alternatif- alternatif Upaya paling tepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.

- c. Tahap adopsi kebijakan

Dari alternatif-alternatif yang telah diusulkan akan terjadi persaingan alternatif apa yang sesuai dengan keadaan masyarakat kita sehingga alternatif tersebut dapat diadopsi oleh pemerintah dengan bantuan lembaga legislatif.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu tahap pelaksanaan, dimana pada tahap ini para elit kebijakan akan menilai dan mencatat segala kekurangan dan kelebihan apa saja yang ditemui dari kebijakan tersebut.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap evaluasi, kebijakan yang telah diterapkan akan di nilai dengan mempertimbangkan catatan yang ada pada proses implementasi kebijakan dan seberapa besar dampak yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui kebijakan tersebut lebih baik diteruskana tau diberhentikan saja.

1.5.4. Implementasi Kebijakan

Budi Winarno (2005:101) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu alat adminitrasi hukum, sebagaimana poin-poin penting dalam suatu kebijakan publik disatukan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Horn (Tahir, 2014:55) implementasi ialah semua kegiatan yang dijalankan oleh sektor publik atau swasta, oleh orang atau organisasi, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007: 49) implementasi ialah pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan yang biasanya berbentuk perintah-perintah eksekutif yang ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi secara terstruktur.

Menurut Mulyadi (2015: 12) tahapan-tahapan implementasi sebagai berikut:

1. Tahapan legislasi disetujui.
2. Keputusan dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
3. Menjalankan keputusan terhadap kelompok sasaran
4. Dampak dari keputusan yang dikehendaki.
5. Proses perbaikan terhadap kebijakan dan peraturan perundangan.

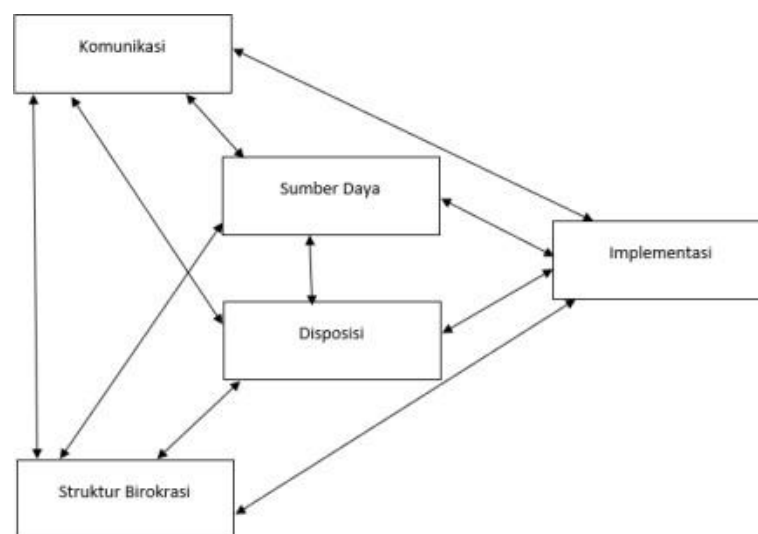
Menurut Purwanto (Syahida, 2014: 13) Elemen yang dapat menentukan suksesnya suatu proses implementasi, yakni:

1. Kualitas kebijakan yang dihasilkan
2. Kecukupan hal-hal yang termasuk dalam input kebijakan (khususnya anggaran).
3. Kesesuaian instrumen dalam mencapai target kebijakan
4. Kemampuan implementor.
5. Besarnya pengaruh dari kelompok pendukung.
6. Keadaan lingkungan terkait.

1.5.5. Model Implementasi Kebijakan

Ada dua model pendekatan pada implementasi kebijakan, yaitu *bottom up* dan *top down*. Menurut Pressman dan Wildavsky (1973) *top down* merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan mengenai implementasi kebijakan yang mengalami kegagalan. Namun, pendekatan ini

menuai banyak kritik karena dianggap hanya mementingkan pembuat kebijakan. Berdasarkan kegagalan pendekatan tersebut, maka dibuat pendekatan *bottom up*, pendekatan ini memasukan tujuan, jaringan kerja para aktor, aksi mereka, dan strategi. Dengan adanya pendekatan ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah tidak terlalu berpartisipasi.



Sumber: Edwards III dalam Subarsono 2005:91

Gambar 1.2 Model Implementasi

Berdasarkan Gambar 1.1 menjelaskan bahwa Edward III mengembangkan model implementasi berdasarkan pendekatan top-down, dalam menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut berhasil dengan melihat empat faktor yakni:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan kelompok yang menjadi sasaran berjalan dengan

baik. Dengan komunikasi yang baik seperti adanya sosialisasi kebijakan, maka tujuan dari dibuatkan kebijakan tersebut akan mudah untuk dicapai.

2. Sumber Daya

Efektifnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari SDM maupun sumber daya finansial. SDM sangat dibutuhkan kualitas dan kuantitasnya sebagai implementor, diharapkan penggunaan wewenang dapat dilakukan sebagaimana mestinya, agar mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari kelompok sasaran kepada kebijakan yang dikeluarkan atau implementor.

3. Disposisi

Disposisi dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, karena pelaksana kebijakan dituntut untuk memahami apa saja yang harus dilakukan dan mempunyai keahlian dalam pelaksanaannya. Para pelaksana kebijakan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut jika para pelaksana kebijakan tersebut tidak melakukan kebijakan dengan baik, maka dari itu dibutuhkan pemilihan para pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab dan memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi bagi kepentingan warga.

4. Struktur Birokrasi

Ada dua faktor penting dalam sistem birokrasi, yakni struktur organisasi serta mekanisme pada pelaksana itu sendiri. Struktur organisasi pelaksana diharapkan dapat mengambil keputusan dalam implementasi kebijakan dengan cepat dan tepat. Sedangkan pada mekanisme pelaksana kebijakan telah diatur dalam SOP atau *Standard Operating Procedure*, dimana dalam SOP tersebut telah menerangkan kerangka kerja yang sistematis, tidak berbelit, dan jelas bagi seluruh

stakeholders karena merupakan pedoman bagi implementor.

1.6. Operasional Konsep

1.6.1. Implementasi kebijakan PERBUP no 62/2018

Berdasarkan PERBUP Sidoarjo No 62 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) di Kabupaten Sidoarjo pada Pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang berisi:

1. Setiap perizinan perusahaan wajib diberikan melalui sistem OSS.
2. Perizinan berusaha seperti yang tercantum pada ayat (1) terdiri dari Izin usaha, mencakup:
 - a. Izin lokasi
 - b. Izin lokasi perairan
 - c. Izin lingkungan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan.
 - e. Izin komersial/operasional.
3. Pelaksanaan perizinan usaha seperti dalam ayat (2) digantungkan pada pelaksanaan kewajiban.
4. Setelah dilakukan verifikasi, pemeriksaan, dan validasi oleh DPMPTSP, perizinan melalui sistem OSS untuk perizinan seperti pada ayat (2) dilaksanakan.

1.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat PERBUP no 62/2018

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja kelebihan dan

kekurangan penggunaan system OSS, hal ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Edward III yakni :

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan efektif jika ada komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran berjalan dengan baik. Dengan komunikasi yang baik seperti adanya sosialisasi kebijakan maka tujuan dari dibuatkan kebijakan tersebut akan mudah untuk dicapai.

b. Sumber Daya

Efektifnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari SDM ataupun sumber daya anggaran. SDM sangat dibutuhkan kualitas dan kuantitasnya sebagai implementor, diharapkan penggunaan wewenang dapat dilakukan sebagaimana mestinya, agar mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari kelompok sasaran kepada kebijakan yang dikeluarkan atau implementor.

c. Disposisi

Disposisi dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, karena pelaksana kebijakan dituntut untuk memahami apa saja yang harus dilakukan dan mempunyai keahlian dalam pelaksanaannya. Para pelaksana kebijakan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut jika para pelaksana kebijakan tersebut tidak melakukan kebijakan dengan baik, maka dari itu dibutuhkan pemilihan para pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab dan memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi bagi kepentingan warga.

d. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi, yaitu struktur organisasi dan mekanisme pada

pelaksana itu sendiri menjadi hal yang penting. Struktur organisasi pelaksana diharapkan dapat mengambil keputusan dalam implementasi kebijakan dengan cepat dan tepat. Sedangkan pada mekanisme pelaksana kebijakan telah diatur dalam SOP atau *Standard Operating Procedure*, dimana dalam SOP tersebut telah menerangkan kerangka kerja yang sistematis, tidak berbelit, dan jelas bagi seluruh stakeholders karena merupakan pedoman bagi implementor.

1.7. Argumen Penelitian

Laporan pembuatan berbagai jenis perizinan setiap tahunnya semakin meningkat, menyebabkan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang untuk pembuatan berbagai jenis peizinan terintegrasi secara elektronik. Alasan peneliti mengambil topik ini adalah dengan meningkatnya laporan pembuatan berbagai jenis perizinan yang akan dilakukan melalui sistem elektronik yang dikenal dengan sebutan OSS, namun sistem elektronik yang terintegrasi di pusat ini masih mengalami beberapa ketidaksesuaiaan antara pusat dan daerah, yang menyebabkan terhambatnya pembuatan surat izin.

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan pembatasan kegiatan pada sektor perizinan di Kabupaten Sidoarjo dapat ditentukan dari komunikasi para *stakeholders*, sumber daya seperti kualitas dan kuantitas *stakeholders* dan anggaran yang digunakan, perilaku dari para pelaku kebijakan dan tanggung jawab serta komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu mengefektifkan pembuatan surat izin di Kabupaten Sidoarjo.

1.8. Fenomena Penelitian

1. Implementasi PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal ayat 1-4.
2. Faktor pendukung dan penghambat menurut Teori Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi .

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Studi ini memakai metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana studi ini akan mendeskripsikan dan menjabarkan objek-objek yang berhubungan pada permasalahan studi ini. Sugiyono (2016: 9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode studi yang dimana objek pada penelitiannya merupakan objek dalam keadaan yang alami dan peneliti berfungsi sebagai alat utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2017: 147) menyatakan pengertian deskriptif adalah menganalisis data dan informasi yang ada menjelaskan data dan informasi yang telah terkumpul tanpa ada maksud untuk meberikan kesimpulan secara general.

1.9.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah suatu wilayah sebagai lokasi pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti bagi keperluan mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Objek yang diperoleh oleh peneliti dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

1.9.3. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek pada studi ini menurut tema penelitian yang diteliti tentang Implementasi Perizinan Melalui Sistem OSS pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Maka peneliti menentukan subjek penelitiannya adalah pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam proses implementasi system OSS di Kabupaten Sidoarjo.

Pada studi ini, peneliti memilih informan memakai teknik purposive. Arikunto (2006) mengungkapkan teknik purposive merupakan cara yang dapat digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan adanya alasan yang berfokus pada tujuan tertentu. Pada studi ini subjeknya ialah berbagai pihak yang terlibat pada proses implementasi sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan subjek penelitian tersebut guna memperoleh data dan informasi terkait implementasi sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.3. Sumber Daya

INFORMAN	JUMLAH	PERSENTASE	TEKNIK
PEMERINTAH	4	50%	PURPOSIVE
NON PEMERINTAH	4	50%	PURPOSIVE

1.9.4. Jenis Data

Sugiyono (2015: 13) menyebutkan penelitian memiliki 3 jenis data yaitu terdiri dari kualitatif, kuantitatif, serta gabungan antara keduanya. Pada studi ini peneliti memakai data kualitatif dimana peneliti berperan sebagai instrumen itu sendiri.

Data kualitatif berisikan data yang berupa tulisan, kata-kata, serta

gambar. Dalam studi ini penulis memakai jenis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan teks ataupun kata-kata tertulis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

1.9.5. Sumber Data

Menurut Zulfafrial (2012: 46) sumber data ialah sebuah subjek darimana sumber data tersebut didapatkan. Menurut Sugiyono (2009: 255) Sumber data, berdasarkan kategorinya, dibedakan menjadi dua bagian, yakni data primer serta sekunder.

a. Data primer

Informasi yang disampaikan langsung kepada pencari informasi. Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari subjek yang bersangkutan yang didapatkan melalui teknik wawancara informan atau sumber langsung. Data primer dari studi ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan kebijakan program Implementasi Perizinan Melalui Sistem OSS pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2015: 187) data sekunder ialah data pendukung yang dapat diperoleh melalui kajian 33 literature yaitu melalui arsip, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan situs internet terdahulu yang mempunyai tema yang serupa dengan studi yang bersangkutan. Pada studi ini data sekunder yang dipakai bagi studi ini yakni literature, jurnal, artikel serta situs-situs internet yang berkaitan pada objek penelitian, yakni Implementasi Perizinan Melalui Sistem OSS pada DPMPTSP

Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga melalui dokumen yang Dinas terkait miliki yaitu DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada hal ini pengumpulan data memakai Teknik wawancara jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat. Afifudin (2009: 131) mendefinisikan wawancara sebagai metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang bersangkutan. Peneliti menggunakan metode wawancara tidak berstruktur dalam studi ini. Sugiyono (2015: 137) mendefinisikan teknik wawancara tidak terstruktur sebagai teknis wawancara yang dilakukan secara bebas atau acak sehingga tidak ada aturan khusus harus berapa dan bagaimana narasumber yang diwawancarai tetapi tetap menggunakan panduan wawancara sesuai prosedur.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2014: 145) observasi ialah sebuah proses yang menggabungkan antara proses biologis serta psikologis. Observasi bertujuan untuk menjabarkan hal yang dipelajari oleh peneliti secara lebih detail lagi, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Observasi ini dilakukan dengan mencatat dan menganalisis semua yang berhubungan dengan Sistem OSS Pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2014: 244) analisis data merupakan proses penyusunan secara urut suatu data yang didapatkan dari catatan lapangan, hasil dari dokumentasi dan wawancara dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok- kelompok kemudian dijabarkan membagi ke dalam komponen, lalu menyatukan dan mengatur pola dilanjut dengan memilah yang penting untuk dipeleajari dan terakhir adalah membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

Miles dan Huberman (1984) metode analisis data menggunakan:

a. Reduksi data

Kegiatan mencari inti dari data yang telah didapat dari narasumber yang ada, memilah hal yang berfokus pada tujuan penelitian dan tidak terlalu melebar.

b. Penyajian data

Data yang akan ditampilkan disusun dengan sedemikian rupa secara sistematis agar data yang ditampilkan mudah dipahami dan tidak membuat bingung.

c. Kesimpulan

Temuan baru yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung yang belum pernah ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.9.8. Kualitas Data

Data yang valid dapat dicapai menggunakan cara triangulasi. Menurut Afifudin (2009: 143) triangulasi merupakan Teknik pengecekan untuk mengetahui validitas data tersebut. Terdapat empat macam triangulasi guna memeriksa validitas data (Patton dalam Afifudin, 2009: 143), yaitu:

1) Triangulasi teori

Menggunakan sejumlah teori yang berbeda untuk menjamin data yang dikumpulkan telah sesuai dengan syarat-syarat.

2) Triangulasi data

Memakai sejumlah sumber informasi, seperti wawancara, dokumen, dan hasil pengamatan.

3) Triangulasi pengamat

Menggunakan pengamat diluar peneliti untuk membantu menganalisis hasil pengumpulan data.

Pada studi ini kualitas data di uji menggunakan triangulasi data. Peneliti mengumpulkan berbagai data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang serupa, yaitu wawancara melalui narasumber terkait Implementasi perizinan melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo.

1.9.9. Profil Informan

Tabel 1.4. Data Informan

Kategori	Jabatan
DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo	Kepala Bidang Perizinan
	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Kepala Bidang Pengendalian
	Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi
Masyarakat yang terlibat dalam kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Kepala Bagian Legal Perusahaan yang bergerak di bidang Properti
	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sidoarjo
	Anggota Real Estate Indonesia (REI) Sidoarjo
	Masyarakat non organisasi (Erwin Fathullah)